

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN JURNAL

- Bachtiar Effendie, 1993, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung.
- Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Irawan Soerodjo, 2002, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Arkola, Surabaya.
- Lembaga Administrasi Negara, 2003, *Penyusunan Standar Pelayanan Publik*, LAN, Jakarta.
- Maria Sumardjono S.W, 2005, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta.
- Moenir H.A.S., 2006 *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih, 2006, *Manajemen Pelayanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, "*Metodologi Penelitian Hukum*", Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, 1983, "*Metodologi Penelitian Hukum*", Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, 1994, "*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*", Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2004 "*Penelitian Hukum Normatif*", Rajawali, Jakarta.
- Sumadi Suryabrata, 1988 "*Metodologi Penelitian*", CV. Rajawali, Jakarta.
- Thoha, Miftah, *Perilaku Organisasi*, 1983, Konsep Dasar Dan Aplikasinya, Rajawali Jakarta.
- Winarto Syrachmad, 1985, "*Pengantar Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*", Tarsito, Bandung.

INTERNET

Sumber data : Kantor Pertanahan Kabupaten Pati Sampai dengan Tahun 2014.
[www.bpn.go.id/Portals/0/perencanaan /dokumen-publik/](http://www.bpn.go.id/Portals/0/perencanaan/dokumen-publik/), , Diakses Tanggal 15 Juli 2016.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Optimasi>, Diakses Tanggal 25 juli 2016

<http://kbbi.web.id/optimal>, Diakses Tanggal 25 juli 2016

<http://www.bpn.go.id/Tentang-Kami/Alamat-Kantor-Wilayah-Kantor-Pertanahan>, diakses 17 Agustus 2016

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

UUPA;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997;

Keppres Nomor Nomor 26 Tahun 1988;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 tahun 1981; dan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 594 Tahun 1982.